

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alder, John. 1989. *Constitution and Administrative Law*, London: The Macmilan Press LTD.
- Ashidiqqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketetaneegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Black, Hendry Campbell. 1978. *Black's Law Dictionary*. United State of American: West Publishing.
- Erwin Muhamad dan H. Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbaya. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia Fishing.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014)
- Lailam, Tanto. 2017. *Teori & Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latief, Yudi. 2011. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.

Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)

Moleong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: Pusataka LP3ES.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung

Nawiasky, Hans. 1948. *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, ensiedeln/Zurich/koln, benzyiger, cet. 2

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan PUU Yang Baik*. Jakarta Raja Grafindo.

Yuliandri. 2009. *Asas- Asas pembentukan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PUU
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PUU
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
- Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PUU
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila, Rancangan Peraturan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga
Nonstruktural, dan Rancangan PUU yang dibentuk di Daerah
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan
Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2022 tentang Indikator Nilai Pancasila
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pengharmonisasian Rancangan PUU yang Dibentuk di Daerah Oleh
Perancang PUU
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan dari
Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang PUU
- Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP No. 1
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan
Rekomendasi Peraturan Perundangundangan di Kedeputan Bidang Hukum,
Advokasi dan Regulasi.

C. Jurnal

- Alamsyah, Bunyamin dan Nurul Huda. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. vol. 2, No. 1 (2013).
- Althien J. Pesurnay, “Pancasila Ideology as A field of Interpretation”, Proceeding of the ICSEAS 2017.
- Amarini, Indrianti. “Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum”. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 17, No. 2 (2017).
- Arfa’i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian, “Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang” *Undang: Jurnal hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Arliandes, M. Jefri Candra Febrian dan Bayu Dwi Anggono. “Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi dan Evaluasi sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang yang berkualitas”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 19 No. 4 (2022).
- Aziz, Machmud. “Landasan Formil dan Materil Konstitusional PUU”. *Jurnal legislasi Indonesia*. Vol.6, No. 3 (2009).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Analis dan Evalu
- Bivitri Susanti, “Menyoal jenis dan Jierarki PUU di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Vol. 1 No. 2 (2017)
- Chandranegara, Ibnu Sina. “Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 26 No. 3 (2019).
- Christina Maya Indah Susilowati, “Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2 (2016).
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. “Rekontruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang”. *Jurnal SASI*. Volume 26 Nomor 3, (2020).
- Daim, Nuryanto Ahmad. “Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1 (2019).

- Damardjati Supadjar dkk., “Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila,” *Jurnal Filsafat Seri* 26, 1996.
- Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021).
- Dwiatmoko, Anang & Harsanto Nursadi. “Problematisasi dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 19 No. 3 (2022).
- Eriko Fahri Ginting, dan Dian Agung Wicaksono, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3 (2020)
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti perkembangan Masyarakat”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 (2018).
- Faiz Yonas Bo’a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 (2018).
- Firdaus, Donny Michael. “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang PUU”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No. 3 (2019).
- Gaol, Dora Nina Lumban. “Badan Pengkajian Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Lembaga Non Struktural atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian”. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol. 1, No. 2 (2021).
- Ginting, Eriko Fahri dan Dian Agung Wicaksono. “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2020).
- hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. “Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam PUU di Indonesia” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Volume 1, Nomor 1 (2022).
- Hidayat, Arif dan Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 4 No. 2, 2019.

- Indirani Wauran, “Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum: Haruskah Pancasila Dituangkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945?”, *Jurnal Majelis* 03 (2020).
- Indrianti Amarini, “Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17 No. 2 (2017)
- Iriyanto Widisuseno, “Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara”, *Humanika*, Vol. 20 No. 2 (2014)
- Kurniawati, Yuniar. “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (2016).
- M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 2 No. 3 (2012),
- Ma’atun Fitriah, “Rekonstruksi Perencanaan Pembentukan Undang-Undang dalam Akselerasi Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2 (2023)
- Mandalina, Maria. M. R. F Izzata Laxamana dan Kaharuddin Aldian. “Penegakan Hukum Progresif dalam perkara Judicial Review: Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”. *Jurnal Majelis*. Vol. 4 (2020).
- Manullang, E Fernando. “Mempertanyakan Pancasila Sebagai *Groundnorm*: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasianalisme”. *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020)
- Maryanto, “Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Yustisia* Vol. 4 No. 1 (2015)
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3 (2009),
- Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 3 (2021).
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif legal System Lawrence M. Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*. Vol. 1, No. 1 (2022).
- Prabandani, Hendra Wahanu. “Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum”. *Iblam Law Review*. Vol. 2 No. 1 (2022).

- Prasetyo, Yogi. “Urgensi pembentukan PUU Yang Berkeadilan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2 (2023).
- Putri, Zhaudiva Azzahra dan Rahayu Subekti. “Teori Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1 No. 1 (2022).
- Ramdan, Ajie. “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 4 (2014).
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni. “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional”. *Jurnal Legislasi*. Vol. 6, No. 3 (2009).
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim”. *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya (2014).
- Setiawan, Fendy. “Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi PUU”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 2 (2021).
- Slamet, Kusnu Goesniadha. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 11, No. 27 (2004).
- Sopiani dan Zainal Mubaroq. “Politik hukum Pembentukan PUU Pasca Perubahan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2 (2020).
- Sulistio, Yuri. Antikowati dan Rosita indrayanti. “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Sumakto, Yogi. “Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 Bukan Grundnorm”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 1 (2019).
- Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis dan Hierarki PUU di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Volume 1, Nomor 2 (2017).
- Suwarma Al Muchtar dan Dede Iswandi, “The paradigm of value ideology of pancasila as the basis of citi-zenship education in the global perspective”,

Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018),
(Bandung: Atlantis Press, 2018)

Suzanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. “Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma
hans Kelsen”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 4 (2021).

Ubayana dan Mar’atun Fitriah, “Kedudukan Peraturan Menteri sebagai Bagian dari
PUU”, *Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 2 (2021).

Utomo, Nurrohman Aji. “Menguarai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen
Perwujudan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 4 (2016).

Wahid, Deny Noer. “Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap
Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila”. *Pancasila: Jurnal
Keindonesiaan*. Vol. 3 No. 1 (2023).

Wahid, Deny Noer. “Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap
Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Pancasila: Jurnal
Keindonesiaan*, Vol. 08, No. 01 (2013).

Yuliana, I Kadek dan A.A. Istri Ari Atu Dewei. “Pengahrmonisasian Rancangan
Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum”. *Jurnal Kertha
Semaya*. Vol. 10 No. 1 (2021).

D. Tugas Akhir dan Dokumen Lainnya

BPIP. 2020. “Perencanaan Strategis (Renstra)”, Deputy Bidang Hukum, Advokasi
dan Pengawasan Regulasi, Jakarta.

Caniago, Diki Elnanda. 2013. “Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam
Constitutional Review Di Mahkamah Konstitusi”. Tesis. Program Studi
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Farida, Maria. 2018. “Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan,
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI”, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum
Nasional, Jakarta.

Ibrahim, Anis. 2008. “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi
politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa
Timur”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019. *Pedoman Evaluasi PUU*,
Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019. *Pedoman Evaluasi PUU*. Jakarta.

Muttaqin, Labib. 2018. “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Prespektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)”. Tesis. Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

E. Website

Ali Taher Parasong, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan PUU, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

Arief Cristiono Subroto, Kedudukan Hukum Peraturan/ Kebijakan di bawah Peratuarn Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappennas, [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_d i_Kementerian_PPN_bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_d_i_Kementerian_PPN_bappenas.pdf)

Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2019”, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pip.pdf

Badan Pemibinaan Ideologi Pancasila, Satu Data BPIP : Jumlah ASN – PPNPN (update pertanggal 15 November 2023) , https://data.bpip.go.id/id/dataset/jumlah-asn-dan-profilnya-pns/resource/7c7ac0bd-0d5e-4a7b-9e15-601a50c23472?inner_span=True

Gusti Ayu Ratih Damayanti, Freis Ermessen Dalam Konsep Negara Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/72944-ID-freies-ermessen-dalam-konsep-negara-kese.pdf>, diakses pada 12 November 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Legislasi Semu (*Pseudowetgiving*), https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:legislasi-semu-pseudowetgeving&catid=100&Itemid=180&lang=en, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan,
https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=2019&PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=12&PeraturanSearch%5Bpemeriksaan_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus%5D=

Legislasi Semu (*Pseudowetgeving*),
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:legislasi-semu-pseudowetgeving&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses pada 12 November 2023.

M. Lutfi Chakim, *Pseudowetgiving*,
<http://www.lutfichakim.com/2016/07/pseudowetgeving.html>, diakses pada tanggal 12 november 2023.

Perbandingan Nilai Indikator Pancasila antara Nilai Indikator Pancasila yang disusun oleh BPIP dan Nilai Indikator Pancasila yang disusun oleh BPHN. Nilai Indikator Pancasila yang disusun oleh BPHN termuat dalam Pedoman Evaluasi PUU Nomor PHN-HN.01.03-07,
https://www.bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf

Poycarpus, Rudy, 2017, “UKP PIP Bakal Setingkat Kementerian”,
<http://mediaindonesia.com/read/detail/136983-ukp-pip-bakalsetingkatkementerian>, diakses 27 Juni 2023

Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia,
<https://e-sop.kemenkumham.go.id/badan-pembinaan-hukum-nasional/pusat-analisis-dan-evaluasi-hukum-nasional>, diakses.

Pusdatin, 2020, “BPIP Rampungkan Kajian, Analisis dan Rekomendasi PUU”,
<https://bpip.go.id/berita/1035/296/bpip-rampungkan-kajian-analisis-dan-rekomendasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada 27 Juni 2023

Rofiq Hidayat, Sejumlah Alasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dicabut dari Prolegnas, Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-ruu-haluan-ideologi-Pancasila-dicabut-dari-prolegnas-lt5ee87d9d4e720/>, diakses pada 12 November 2023.